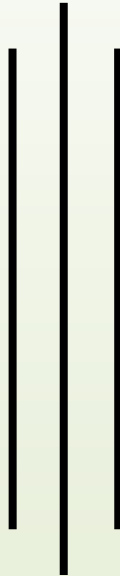




RANCANGAN AWAL
Rencana Kerja
Tahun 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

RANCANGAN AWAL
Rencana Kerja
Tahun 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan,berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Industri, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif)

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 2 urusan pilihan yaitu urusan pilihan bidang perindustrian dan urusan pilihan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan dua urusan tersebut pelaksanaannya di tahun 2023 dibagi menjadi 7 program, 16 kegiatan dan 31 subkegiatan. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mencapai 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95,96%.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian;
2. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD
Dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
I.	PROGRAM PERIZINAN dan PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
7	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan									
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
8	Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 dok	1 dok	2 dok	8 dok	400	1 dok	1 dok	100
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1 unit -	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	100	21 unit	21 unit	100
10	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Wilayah Kerjanya									
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
III.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK dan BARANG PENTING									
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	12 lap	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	12 lap	100
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	12 lap	100
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	12 lap	100
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
14	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang di bina	30 org	30 org	30 org	30 org	100	30 org	30 org	100
V.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
15	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	12 bln		2.000 unit	15.724 unit	786,2	22.000 unit	22.000 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perlengkapan Ditera Ulang								
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100	2 lap	2 lap	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100	5 lap	5 lap	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 ASN	67 ASN	67 ASN	67 ASN	100	67 ASN	67 ASN	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	-	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	-	40 unit	40 unit	100	40 unit	40 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	-	37 unit	37 unit	100	37 unit	37 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
16	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinperindag Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	3,76%	5,10%
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	8.018.180	8.832.360
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,50%	5,37%
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.620.500	3.934.080
		Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	72,41	73,01
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	40%	72,12%
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja						
Capaian Indikator Kinerja : Sangat Tinggi						

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

- a. Program Pengentasan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Daya Saing Pasar Rakyat untuk menghadapi perkembangan Toko Swalayan; Pengendalian Inflasi serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- c. Pengembangan Kawasan terpadu ekonomi, pariwisata dan olahraga di Kawasan GOR Goentoer Darjono dan PFC;
- d. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok;
- e. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
- f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
- g. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
- h. Akses informasi usaha rendah;
- i. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UKM, Usaha Besar dan BUMN);
- j. Kelembagaan yang belum tertata;

2.3.1. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan UKM memberi andil dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan kalau perlu dilakukan Operasi Pasar.
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan peralihan peralatan bagi UKM yang masih menggunakan alat ber Bahan Bakar Minyak diganti dengan peralatan menggunakan daya listrik

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas Dinperindag Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
A	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
I.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	90	9.992.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	90	9.992.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	Jumlah perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan yang diterbitkan	3 bh	4.996.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	Jumlah perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan yang diterbitkan	3 bh	4.996.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab. Purbalingga	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 dok	4.996.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab. Purbalingga	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 dok	4.996.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Terintegrasi Secara Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			Terintegrasi Secara Elektronik		Elektronik			
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang mendapat rekomendasi	3 bh	4.996.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang mendapat rekomendasi	3 bh	4.996.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 dok	4.996.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 dok	4.996.000	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	Persentase Pasar Rakyat layak usaha	42,86%	3.869.543.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	Persentase Pasar Rakyat layak usaha	42,86%	3.869.543.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah sarana distribusi perdagangan yg layak usaha	1 pasar	3.805.374.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah sarana distribusi perdagangan yg layak usaha	1 pasar	3.805.374.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	359.353.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	359.353.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 unit	3.446.021.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 unit	3.446.021.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina	2 unit	64.169.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina	2 unit	64.169.000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	1 dok	64.169.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	1 dok	64.169.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Distribusi Perdagangan		kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Distribusi Perdagangan		kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
III.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	94,44%	567.047.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	94,44%	567.047.000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di daerah	100%	546.568.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di daerah	100%	546.568.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Lap	11.288.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Lap	11.288.000	
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	1 Lap	535.280.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Lap	535.280.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
			Rakyat								
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	14.485.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	14.485.000	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Lap	14.485.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Lap	14.485.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Persentase ketersediaan kebutuhan pupuk dan pestisida bersubsidi	96.33 %	5.994.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Persentase ketersediaan kebutuhan pupuk dan pestisida bersubsidi	96.33 %	5.994.000	
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Lap	5.994.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Lap	5.994.000	
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor	2278 miliar rupiah	39.960.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor	2278 miliar rupiah	39.960.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran	Kab. Purbalingga	jumlah calon eksportir yang telah	30 org	39.960.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran	Kab. Purbalingga	jumlah calon eksportir yang telah	30 org	39.960.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor			Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor			
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Purbalingga	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Produk	39.960.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Purbalingga	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Produk	39.960.000	
V.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,84 %	290.412.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,84 %	290.412.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	Presentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera	64,84 %	290.412.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	Presentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera	64,84 %	290.412.000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	22.000 Unit	290.412.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	22.000 Unit	290.412.000	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
VI.	PROGRAM PENUNJANG		Tingkat kesesuaian antar	100% 100%	8.618.388.000	PROGRAM PENUNJANG		Tingkat kesesuaian antar dokumen	100% 100%	8.618.388.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	82 Angka 100%		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	82 Angka 100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	3.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	3.300.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 doc	1.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 doc	1.800.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 lap	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 lap	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.728.060.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.728.060.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	7.638.069.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	7.638.069.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	54.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	54.640.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	35.351.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	35.351.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	2.331.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	2.331.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	2.331.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	2.331.000	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org 2 org	4.000.000 4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org 2 org	4.000.000 4.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	36.108.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	36.108.000	
1	Penyediaan Komponen	Dinperindag	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.332.000	Penyediaan Komponen	Dinperindag	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.332.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
4	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.652.000	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.652.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	800.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	6.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	6.660.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	2.664.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	2.664.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	727.161.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	727.161.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1.165.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1.165.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Lap	242.564.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	242.564.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	483.432.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	483.432.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	117.428.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	117.428.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperindag	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	110.768.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperindag	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	110.768.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	6.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	6.660.000	
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	275 Unit	698.062.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	275 Unit	698.062.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Kab. Purbalingga	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang	100%	698.062.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Kab. Purbalingga	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang	100%	698.062.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Industri Kabupaten/Kota		tersedia			Industri Kabupaten/Kota		tersedia			
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 doc	189.323.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 doc	189.323.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 doc	384.762.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 doc	384.762.000	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 doc	123.977.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 doc	123.977.000	
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	87,5%	4.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	87,5%	4.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	Kab. Purbalingga	Presentase izin usaha industri yang mendapat rekomendasi	90%	4.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	Kab. Purbalingga	Presentase izin usaha industri yang mendapat rekomendasi	90%	4.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dok	4.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dok	4.000.000	
IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	200 industri	4.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	200 industri	4.000.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Pendataan Industri di Kab. Purbalingga	12 bulan	4.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Pendataan Industri di Kab. Purbalingga	12 bulan	4.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 doc	4.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 doc	4.000.000	
TOTAL					14.101.404.000					14.101.404.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian

a. Arah Pembangunan Industri

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

1. Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan swasta;
2. Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3. Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4. Hilirisasi produk produk pertanian menjadi produk agro industri;
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk produk industri;
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
7. Peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja industri;
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;
9. Penurunan impor;

10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri *intermediate* dan industri hilir;

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah, memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan antara lain

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;

3.2.2. Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;
2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG;
4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan indikator prosentase penggunaan produk dalam negeri;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga rencana di Tahun 2025 akan merencanakan 9 (sembilan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14.611.677.000,00 dan di tahun 2026 sebesar Rp. 15.720.000.000,00 adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

8. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

10. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

12. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
13. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

V. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

15. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

16. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

17. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

18. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

19. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
I.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi		90%	27.087.000		80 unit	28.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan yang diterbitkan	Kab. Purbalingga	4 bh	13.583.000		80 unit	14.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	1 dok	4.996.000		1 dok	5.000.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	Kab. Purbalingga	4 bh	13.504.000			4 bh	14.000.000
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	1 dok	13.504.000			1 dok	14.000.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat layak usaha	Kab. Purbalingga	47,62%	5.030.513.000			10 unit	5.100.000.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yg layak usaha	Kab. Purbalingga	1 unit	4.930.513.000			10 unit	5.000.000.000
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 unit	1.500.000.000			1 unit	1.500.000.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	21 unit	3.430.513.000			21 unit	3.500.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina	Kab. Purbalingga	2 unit	100.000.000			10 unit	100.000.000
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 dok	100.000.000			1 dok	100.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	Kab. Purbalingga	94,44%	174.988.000			94,44%	182.000.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di daerah	Kab. Purbalingga	100%	149.390.000			100%	155.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	1 Lap	14.110.000			12 Lap	15.000.000
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	1 Lap	135.280.000			1 Lap	140.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata harga kepokmas dan barang strategis	Kab. Purbalingga	100%	18.106.000			100%	19.000.000
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kab. Purbalingga	12 Lap	18.106.000			12 Lap	19.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kebutuhan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Purbalingga	100%	7.492.000			100% 8.000.000	
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	12 Lap	7.492.000			12 Lap 8.000.000	
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor		40 org	49.949.000			40 org 50.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti	Kab. Purbalingga	2 kali	49.949.000			2 kali 50.000.000	
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Purbalingga	1 bh	49.949.000			1 bh 50.000.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
V.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		64,84%	284.412.000			77,34%	285.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kab. Purbalingga	64,84%	284.412.000			77,34%	285.000.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Purbalingga	2200 unit	284.412.000			2200 unit	285.000.000
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan		100% 100% 82 Angka 100%	8.039.876.000			100% 100% 82 Angka 100%	8.042.699.000
					9.276.015.000				9.272.214.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		100%	11.000.000			100% 11.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	1 doc	6.000.000			1 doc 6.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dinperindag	5 lap	5.000.000			5 lap 5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	7.109.861.000			100% 7.110.673.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	64 org/bln	6.992.374.000			64 ASN 6.992.374.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	1 Dok	73.299.000			1 Dok 73.299.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Dinperindag	1 dok	44.188.000			1 dok 45.000.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Akuntansi SKPD							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	7.000.000			100% 7.000.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	1 lap	7.000.000			1 kap 7.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	82.219.000			100% 83.894.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	5.309.000			1 Paket 5.309.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	50.660.000			1 Paket 50.660.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dinperindag	1 Dok	2.400.000			1 Dok 2.400.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperindag	1 Lap	8.325.000			1 Lap 8.325.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	1 Lap	8.325.000			1 Lap 10.000.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	1 Dok	7.200.000			1 Dok 7.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	539.132.000			100% 539.132.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	1 Lap	3.500.000			1 Lap 3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	77.400.000			1 Lap 77.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	458.232.000			1 Lap 458.232.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag		290.664.000				291.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperindag	41 unit	115.664.000			41 unit	116.000.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinperindag	20 unit	25.000.000			20 unit	25.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinperindag	1 unit	150.000.000			1 unit	150.000.000
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat		300 Unit	1.226.139.000			325 Unit	1.219.515.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Kab. Purbalingga	100%	1.226.139.000			100%	1.219.515.000
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	406.624.000			1 doc	400.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	372.762.000			1 doc	372.762.000
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	1 doc	446.753.000			1 doc	446.753.000
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi		90%	5.000.000			90%	5.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Purbalingga	100%	5.000.000			100%	5.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha	Kab. Purbalingga	1 dok	5.000.000			1 dok	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
IX. 1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini cakupan industri yang terdata dalam SIINAS		300 industri	5.000.000			400 industri	5.000.000
			Kab. Purbalingga	80%	5.000.000			80%	5.000.000
			Kab. Purbalingga	1 doc	5.000.000			1 doc	5.000.000
	TOTAL				14.611.677.000				15.720.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga


JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004